

DAFTAR ISI

	Hal
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR LAMPIRAN	viii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Pemilihan Judul	1
1.2. Identifikasi Masalah	3
1.3. Maksud dan Tujuan Kerja Praktik	3
1.4. Kegunaan laporan Tugas akhir	4
1.5. Metodologi Tugas akhir	4
1.6. Lokasi dan Waktu Kerja Praktik	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Pengertian Umum Pajak	6
2.1.1. Fungsi Pajak	7
2.1.2. Pembagian Hukum Pajak	8
2.1.3. Pengelompokan Pajak	8
2.1.4. Asas Pemungutan Pajak	9
2.1.5. Kedudukan Hukum Pajak	11
2.1.6. Sistem Pemungutan Pajak	11
2.2. Penerimaan Daerah	12
2.2.1. Sumber Penerimaan Daerah	12
2.3. Pengertian Pajak Daerah	13
2.3.1. Jenis Pajak Daerah	13
2.3.2. Objek, Subjek dan Wajib Pajak Daerah	14

2.3.3.	Pajak Terutang dan Masa Pajak	15
2.3.4.	Sistem Pemungutan Pajak Daerah	15
2.3.5.	Tarif Pajak Daerah	16
2.3.6.	Dasar Pengenaan Pajak Daerah	16
2.3.7.	Cara Perhitungan Pajak Daerah	17
2.4.	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	18
2.4.1.	Dasar Hukum Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	18
2.4.2.	Objek dan Bukan Objek BBNKB	19
2.4.3.	Subjek Pajak dan Wajib Pajak BBNKB	20
2.4.4.	Dasar Pengenaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	21
2.4.5.	Tarif Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	22
2.5.	Pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	23
2.5.1.	Pendaftaran dan Pendataan	23
2.5.2.	Perhitungan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	24
2.5.3.	Penagihan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	24
2.5.4.	Pembayaran dan Penyetoran Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	25
2.5.5.	Pelaporan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	25
2.6.	Sanksi Administrasi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	26
2.7.	Keringanan dan Pembebasan Pajak	26

BAB III OBJEK DAN METODE PENELITIAN

3.1.	Objek Penelitian	28
3.1.1.	Gambaran Singkat Dinas Pendapatan Daerah	28

3.1.2.	Gambaran Singkat Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Jawa Barat	30
3.1.3.	Visi dan Misi	30
3.2.	Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi, Struktur Organisasi Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah XXII (Bandung Timur)	31
3.2.1.	Kedudukan	31
3.2.2.	Tugas Pokok dan Fungsi	31
3.3.	Struktur Organisasi Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah XXII (Bandung Timur)	31
3.4.	Pelaksanaan Kerja Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah XXII (Bandung Timur)	32
3.4.1.	Kepala Unit Pelayanan Pendapatan	32
3.4.2.	Subbagian Tata Usaha	32
3.4.3.	Seksi PKB/BBNKB	33
3.4.4.	Seksi Pajak Non PKB/BBNKB	34
3.4.5.	Seksi Non Pajak	35
3.4.6.	Instalasi	36
3.4.7.	Kelompok Jabatan Fungsional	36
3.5.	Metode Tugas Akhir	36
3.6.	Teknik Pengumpulan Data	36

BAB IV ANALISIS

4.1.	Landasan Hukum Pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	38
4.2.	Pelaksanaan Pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	38
4.2.1.	Pendaftaran BBNKB	38
4.2.2.	Penghitungan BBNKB	40
4.2.3.	Penagihan BBNKB	46

4.2.4.	Penyetoran BBNKB	46
4.3.	Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam melaksanakan pemungutan BBNKB serta upaya-upaya yang ditempuh oleh UPPD Bandung Timur	47
4.3.1.	Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam melaksanakan pemungutan BBNKB pada UPPD Bandung Timur	47
4.3.2.	Upaya-upaya yang Dilakukan untuk mengatasi Hambatan Pemungutan BBNKB pada UPPD Bandung Timur	47
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1.	Kesimpulan	49
5.2.	Saran-saran	50

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP